

**LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI**  
**(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)**

---

- Rapat ke : 18 (delapan belas)  
Masa Persidangan : I  
Tahun Sidang : 2023 – 2024  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BUMNIP Komisi I DPR RI dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas  
Hari, Tanggal : Senin, 11 September 2023  
Pukul : 13.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Utut Adianto, Ketua Panja BUMNIP Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt.1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : 1. Kebijakan strategis Industri Pertahanan (Indhan) yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional;  
2. Kinerja *holding* BUMN Indhan untuk kepentingan bangsa dan negara;  
3. Urgensi revitalisasi Indhan menuju Indhan yang unggul dan yang berdaya saing;  
4. Tinjauan Indhan dari sisi SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*); dan  
5. Pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang berdaya saing  
Hadir : 1. ... orang dari 30 Anggota Panja BUMNIP Komisi I DPR RI  
2. a) Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Bogat Widyatmoko, S.E., MA;  
b) Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Dr. Mego Pinandito, M. Eng;  
c) Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas; Marsma TNI Rolland Dulista G. Waha;  
beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1), Pasal 281 ayat (1), dan Pasal 282 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 13.14 WIB dengan Rapat bersifat terbuka untuk umum.
2. RDP Panja BUMNIP Komisi I DPR RI dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Utut Adianto, Ketua Panja BUMNIP Komisi I DPR RI.

## II. KESIMPULAN

1. Panja BUMNIP Komisi I DPR RI telah menyimak presentasi dan penjelasan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, dan Direktur Pengkajian Pertahanan dan Keamanan Geografi Lemhannas terkait dengan agenda RDP yaitu:
  - a. Kebijakan strategis Indhan yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional;
  - b. Kinerja holding BUMN Indhan untuk kepentingan bangsa dan negara;
  - c. Urgensi revitalisasi Indhan menuju Indhan yang unggul dan yang berdaya saing;
  - d. Tinjauan Indhan dari sisi SWOT; dan
  - e. Pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang berdaya saing.
2. Panja BUMNIP Komisi I DPR RI meminta:
  - a. BRIN agar lebih meningkatkan kajian Indhan yang lebih komprehensif yang mencakup antara lain tata kelola, risiko, daya dukung dan daya hidup, serta kesinambungan BUMNIP tetap terjaga dan berdaya saing.
  - b. Bappenas agar dalam melakukan perencanaan lebih realistis sebagai upaya penguatan dan pengembangan industri pertahanan.
  - c. Lemhannas agar kajian yang dilakukan tidak hanya dari sisi benefit yang diperoleh, tetapi juga dari sisi pembiayaan (*spending*) yang harus ditanggung oleh Indhan atau BUMNIP.
  - d. BRIN, Bappenas, dan Lemhannas agar menyampaikan jawaban tertulis yang berkaitan dengan:
    - i. kondisi realita dan ideal BUMNIP setelah adanya UU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).
    - ii. data dan angka yang diminta oleh Anggota Panja BUMNIP Komisi I DPR RI.
    - iii. jawaban tertulis disampaikan kepada Sekretariat Komisi I DPR RI paling lambat akhir September 2023.
3. Keseluruhan materi presentasi yang telah disampaikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahan kajian Panja BUMNIP Komisi I DPR RI dalam merumuskan kesimpulan dan usulan rekomendasi yang akan disusun.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.07 WIB.

Jakarta, 11 September 2023  
**KETUA RAPAT**

**UTUT ADIANTO**  
**A-194**